



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNIRWANSYAH
2. Jabatan : KEPALA KANWIL
3. NHK : 70235

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.157.987.000

1. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.325.850.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.524.765.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/126 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.026.200.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/203 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 262.085.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.926.880.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/93 m2 di KAB / KOTA
JOMBANG, WARISAN Rp. 158.487.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 454.360.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 454.360.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 871.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000



2. MOTOR, VESPA PIAGIO GTS 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI NEW EXPANDER CROSS Tahun 2022,
HASIL SENDIRI Rp. 327.000.000
4. MOBIL, BMW X3 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	332.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	978.085.130
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	9.339.072.130
III. HUTANG	Rp.	60.702.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.278.370.130

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.